KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pernyataan Puan Soal Sumbar Dinilai Ahistoris
Tanggal : Sabtu, 05 September 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pernyataan Puan Soal Sumbar Dinilai Ahistoris

FEBRIAN FACHRI,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

PADANG – Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) agar mendukung negara Pancasila berbuntut panjang. Pernyataan Ketua DPR RI itu dinilai keliru dan ahistoris.

Pengamat Politik dari Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Israr Iskandar, mengatakan, Puan harus belajar lagi sejarah di mana tokoh-tokoh nasional dari Sumbar memberikan kontribusi besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam merumuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara.

"Kalau membaca sejarah, harus dilihat secara utuh. Orang Sumbar jelas memiliki kontribusi besar dalam sejarah Republik, termasuk sejarah perumusan Pancasila," kata Israr kepada *Republika*, Jumat (4/9).

Israr mengingatkan mengenai peranan M Yamin yang langsung ikut ke dalam tim yang merumuskan konsep Pancasila. Kemudian, kontribusi besar Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dalam memperkuat tatanan NKRI ketika sedang memperjuangkan kemerdekaan.

Saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila, kendati Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.

"Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatra Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," ujar Puan.

Menurut Israr, Puan mengatakan hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan karena PDIP meraup suara cukup kecil di Sumbar. PDIP bahkan tak meloloskan satu pun calon legislatif DPR RI dari Sumbar. Kemudian, pasangan capres dan cawapres yang diusung PDIP, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin, juga kalah telak di Sumbar pada Pilpres 2019.

Namun, selain itu, Israr menduga Puan dan para elite PDIP juga karena bayang-bayang masa lalu di mana ketika Presiden Sukarno masih berkuasa, di Sumbar terjadi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958. Saat itu, kata dia, PRRI menentang pemerintahan Sukarno karena adanya perbedaan pandangan.

"Memang kalau lihat PRRI, kesannya tidak Pancasilais, padahal itu gerakan koreksi terhadap pelanggaran Pancasila, walaupun akhirnya tergelincir pada gerakan disintegrasi. Itu harus diakui," ujar Israr.

Namun, yang terjadi sekarang menurut Israr sudah beda lagi mengenai persepsi seseorang yang berjiwa Pancasila. Kini persepsi siapa lebih Pancasilais dan siapa yang kurang Pancasilais didasarkan pada pilihan politik mutakhir. Menurut Israr, persepsi tersebut kurang bijak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia Arteria Dahlan meminta warga Sumbar menahan diri terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dinilai menyinggung warga Sumbar. Ia meyakini, apa yang disampaikan Puan tidak bermaksud menyinggung perasaan orang Minang. "Jangan mau dipecah belah. Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan," kata Arteria. ■ ed: mas alamil huda